

# TATA KELOLA PENANGGULANGAN BENCANA PADA MASA TANGGAP DARURAT DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aziizah Rahmasari

NPP. 30.1183

*Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

aziizahrahma1@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Petrus Polyando, S.STP, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** One of the areas in Indonesia where natural disasters often occur is Gowa Regency, South Sulawesi Province. Disaster events that often occur require handling in the face of various types of disasters, in this case it is carried out based on an assessment of disaster threats by identifying types of threats, historical data on disaster events and the results of expert studies on potential disasters in an area. Facing various disaster events, the government has made efforts by enacting Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management which is a guideline for regulation in every plan and action that will be carried out by the government and the community in dealing with disasters. **Purpose:** This study aims to identify the causative factors of disaster management during the emergency response period that have not been carried out systematically in Gowa Regency. **Method:** This study used a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews, and documentation. In this study the informants were determined through purposive and snowball sampling techniques. Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that the Management of Disaster Management during the Emergency Response Period in Gowa Regency was examined from 2 (two) collaborative processes that affected the management of disaster emergency response, namely: the process of face-to-face dialogue and the process of building trust. Based on the results of the study, it can be concluded that Disaster Management Management During the Emergency Response Period in Gowa Regency has not been carried out systematically, seen from the 2 (two) collaboration processes which are considered to be inadequate in supporting the management of disaster emergency response which causes a lack of communication relations between parties to build understanding together in preparing all forms of emergency response plans and strategies. In addition, there are limited information, lack of human resources, and inadequate infrastructure, which are factors causing disaster management during the emergency response period that has not been carried out systematically in Gowa Regency, South Sulawesi Province. **Conclusion:** The Government of Gowa Regency stipulates a disaster management plan periodically in the medium and long term which involves various parties in compiling and updating the disaster management strategic plan during the emergency response period, providing an even dissemination of information and adding work equipment, and increasing the capacity of human resources so that governance of disaster management during the emergency response period in Gowa Regency has become more organized with a standardized and systematic emergency response management mechanism that will reduce the greater impact of a disaster event.

**Keywords:** *Governance, Disaster Management, Emergency Response.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Salah satu daerah di Indonesia yang sering terjadi bencana yaitu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa bencana yang sering terjadi memerlukan penanganan dalam menghadapi berbagai jenis bencana, dalam hal ini dilakukan berdasarkan penilaian ancaman bencana dengan identifikasi jenis ancaman, data sejarah kejadian bencana dan hasil kajian para pakar tentang potensi bencana di suatu daerah. Menghadapi berbagai peristiwa bencana pemerintah telah melakukan upaya dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman pengaturan dalam setiap perencanaan maupun aksi yang akan di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum dilakukan secara sistematis di Kabupaten Gowa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa di kaji dari 2 (dua) proses kolaborasi yang mempengaruhi pengelolaan tanggap darurat bencana, yaitu : proses dialog tatap muka dan proses membangun kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa belum dilakukan secara sistematis dilihat dari 2 (dua) proses kolaborasi yang dinilai masih kurang baik dalam mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana yang menyebabkan kurangnya hubungan komunikasi antar pihak untuk membangun pemahaman yang sama dalam mempersiapkan segala bentuk perencanaan dan strategi pelaksanaan tanggap darurat. Selain itu terdapat keterbatasan informasi, kurangnya sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menjadi faktor penyebab penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum dilakukan secara sistematis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan rencana penanggulangan bencana secara periodik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak dalam menyusun serta memperbarui rencana strategi penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, menyediakan penyebaran informasi yang merata serta menambah peralatan kerja, dan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa menjadi lebih tertata dengan mekanisme tata kelola tanggap darurat yang baku dan sistematis akan mengurangi dampak yang lebih besar akibat peristiwa bencana.

**Kata kunci: Tata Kelola, Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Salah satu daerah di Indonesia yang sering terjadi bencana yaitu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa bencana yang sering terjadi memerlukan penanganan dalam menghadapi berbagai jenis bencana, dalam hal ini dilakukan berdasarkan penilaian ancaman bencana dengan identifikasi jenis ancaman, data sejarah kejadian bencana dan hasil kajian para pakar tentang potensi bencana di suatu daerah. Berikut data kejadian bencana di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai 2021.

**Tabel I.1**  
**Rekapitulasi Kejadian Bencana Di Kabupaten Gowa Tahun 2017 s/d 2021**

No	Tahun Kejadian	Jenis Bencana			Total Bencana	Kecamatan Terdampak	Korban	Kerusakan
		Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung				
1	2017	0	0	1	1	1	140	28
2	2018	1	0	1	2	8	3	7
3	2019	1	1	0	2	16	2240	11
4	2020	0	2	0	2	2	30	22
5	2021	1	0	0	1	9	250	0

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kejadian bencana terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun belakangan ini adalah terjadi pada tahun 2019. Menghadapi berbagai peristiwa bencana pemerintah telah melakukan upaya dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman pengaturan dalam setiap perencanaan maupun aksi yang akan di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana yaitu prabencana yang dilakukan pada saat tidak terjadi bencana dan saat sedang dalam ancaman potensi bencana; Tanggap darurat dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana; dan Pascabencana saat setelah terjadi bencana.

Dari semua tahap penanggulangan bencana, tanggap darurat menjadi masa paling krusial yang menentukan besar dampak kejadian bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pengurusan pengungsi, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan prasarana dan sarana (UU No.24 Tahun 2007). Upaya penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat ini sebenarnya telah melibatkan banyak pihak seperti halnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia (PMI), Satpol PP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Banyak pihak dari berbagai lembaga ini semestinya penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat bisa terlaksana dengan baik.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian bahaya/ancaman dapat dilakukan dengan nilai pembobotan ancaman berdasarkan probabilitas (P) ancaman dan dampak (D) kejadian. Nilai Probabilitas dan dampak yang tinggi akan menjadi prioritas penanganan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa (BPBD,2016). Berikut tabel penilaian ancaman/bahaya di Kabupaten Gowa.

**Tabel 1.2.2**  
**Penilaian Ancaman/ Bahaya di Kabupaten Gowa**

NO	JENIS BENCANA	PROBABILITAS	DAMPAK
	Bencana Alam		
1	Banjir	4	3
2	Kekeringan	3	2
3	Tanah Longsor	2	1
	Bencana Non Alam		
4	Kebakaran Pemukiman	4	2

NO	JENIS BENCANA	PROBABILITAS	DAMPAK
5	Wabah Penyakit/ Epidemi	3	2
6	Kegagalan Teknologi	4	2
	Bencana Sosial		
7	Konflik/ Kerusakan/ Aksi Teror	3	1

Sumber : BPBD Kabupaten Gowa, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa terdapat beberapa jenis potensi bencana seperti bencana alam , bencana non alam, dan bencana sosial. Setiap bencana memiliki tingkat probabilitas dan dampak yang berbeda-beda. Dalam penilaian ini bencana alam memiliki penilaian tinggi dalam probabilitas dan dampak bencana. Nilai tertinggi dalam penilaian tersebut adalah bencana banjir. Penilaian probabilitas ini dilihat dari prediksi waktu kemungkinan terjadi suatu bencana setiap tahunnya. Sedangkan penilaian dampak bencana berpatokan pada luas wilayah terdampak bencana yang mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu transportasi serta terganggunya pelayanan public di berbagai sektor.

**Tabel 1.2.1**  
**Data Kejadian Bencana Kabupaten Gowa Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Jenis Bencana	Penyebab	Curah Hujan	Keterangan
1	Somba opu	Banjir	Intensitas + bukaan dam bilibili	376 mm	Ketinggian air 0,5 - 1,5 m
2	Bontomarannu	Banjir	Hujan intensitas tinggi	274 mm	Ketinggian air 1 m
3	Bungaya	Banjir, tanah longsor	Hujan intensitas tinggi	274 mm	Ketinggian air 0,5
4	Bajeng	Angin kencang	Hujan intensitas tinggi	65 mm	-
5	Bajeng barat	Angin kencang	Hujan intensitas tinggi	65 mm	-
6	Pattalassang	Banjir	Hujan intensitas tinggi	354 mm	Ketinggian air 1 m
7	Parangloe	Banjir dan tanah longsor	Hujan intensitas tinggi	354 mm	Ketinggian air 1 m
8	Pallangga	Banjir	Rusaknya Bendungan jenelata	364 mm	Ketinggian air 1 mm - 2,5 m
9	Bontonompo selatan	Angin kencang	Hujan intensitas tinggi	65 mm	-
10	Tombolo pao	Banjir dan tanah longsor	Hujan intensitas tinggi	364 mm	(ketinggian air 1 m)
11	Manuju	Banjir, longsor,	Hujan intensitas tinggi	364 mm	-
12	Tompobulu	angin kencang	Hujan intensitas tinggi	364 mm	Ketinggian air 1 m
13	Parigi	Longsor	Hujan intensitas tinggi	274 mm	-
14	Tinggimoncong	Longsor, banjir	Hujan intensitas tinggi	354 mm	(ketinggian air 1 m)

NO	Kecamatan	Jenis Bencana	Penyebab	Curah Hujan	Keterangan
15	Biringbulu	Longsor, angin kencang	Hujan intensitas tinggi	274 mm	-
16	Bontolempangan	Longor, banjir	Hujan intensitas tinggi	364 mm	Ketinggian air 50 cm

Sumber : BPBD Kabupaten Gowa, 2019

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Gowa mengalami banyak kejadian bencana pada tahun 2019 yang terjadi di 16 (enam belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Gowa. Bencana yang terjadi di 16 kecamatan tersebut adalah bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang sebagian besar disebabkan karena tingginya intensitas hujan saat itu hingga menyebabkan banjir terparah dengan ketinggian air mencapai 1,5 m – 2,5 m yang terjadi di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga. Akibat peristiwa bencana tersebut menimbulkan beberapa masalah yang di hadapi oleh masyarakat yaitu munculnya korban jiwa, aktivitas warga terhambat, sulitnya air bersih, kerugian ekonomi, dan masalah kesehatan. Faktanya peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Gowa masih menimbulkan banyak korban dan kerugian materi. Semestinya dengan banyak pihak yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat dapat lebih memudahkan kegiatan tanggap darurat dengan cepat dan tepat sehingga mengurangi dampak dan permasalahan yang ditimbulkan saat peristiwa bencana.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Ilma Adinata yang berjudul “Analisis Tata Kelola Desa Tangguh Bencana Dalam Perspektif Pengurangan Risiko Bencana (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tahun 2014-2016)” menjelaskan bahwa Desa Banjarsari Kecamatan Gabus Kabupaten Pati melakukan pengelolaan desa tangguh bencana dengan tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan desa tangguh bencana serta unsur-unsur yang mendorong dan menghambat penyelenggaraan.

Penelitian dari Rubi Setiawan, dkk yang berjudul “Perancangan Sistem Pengelolaan Penanggulangan Bencana Alam Garut Berbasis Sistem Informasi Geografis”, menjelaskan bahwa pengelolaan memanfaatkan sistem informasi berbasis sistem informasi geografis untuk kemudahan menerima informasi dan mengelola pelaksanaan mitigasi bencana alam dengan menciptakan perangkat lunak berupa aplikasi pengelolaan dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Garut.

Penelitian dari Ischa Maburris Sahilala yang berjudul Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris Pada Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro)”, menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberian bantuan logistik bagi korban bencana lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, bagaimana pelaksanaannya, serta pembangunan metode kebijakan dan program logistik yang jauh lebih efektif.

Penelitian dari Nurul Aisyah yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Nagari Situjuh Batua)”, tujuan dari penelitiannya yakni untuk mengkaji administrasi Dana Masyarakat di wilayah desa darurat penanggulangan bencana alam penanganan Covid 19 di Nagari Situjuh Batua tahun anggaran 2020.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Ilma Adinata yang berjudul “Analisis Tata Kelola Desa Tangguh Bencana Dalam Perspektif Pengurangan Risiko Bencana (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Gabus

Kabupaten Pati tahun 2014-2016)” dengan fokus lokasi terletak pada Desa Banjarsari Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan periode penelitian dari tahun 2014 s/d 2016..

Penelitian yang dilakukan oleh Rubi Setiawan, dkk yang berjudul “Perancangan Sistem Pengelolaan Penanggulangan Bencana Alam Garut Berbasis Sistem Informasi Geografis” lebih fokus membahas terkait perancangan sistem pengelolaan penanggulangan bencana alam berbasis sistem informasi geografis atau SIG di daerah Kabupaten Garut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ischa Maburris Sahilala yang berjudul Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris Pada Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro)”, membahas secara fokus pada tata kelola distribusi bantuan logistik korban bencana alam khususnya banjir yang terjadi di daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aisyah yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Nagari Situjuh Batua)” fokus membahas terkait tata kelola dana desa yang digunakan untuk menangani kasus bencana darurat dan mendesak terkait pandemi covid-19 pada tahun anggaran 2020 di Nagari Situjuh Batua.

Sementara tema penelitian yang diangkat oleh penulis berjudul “Tata Kelola Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.” Tema Penelitian ini belum banyak dilakukan karena terdapat perbedaan dalam fokus utama penelitian yaitu melakukan identifikasi apa yang menjadi faktor penyebab belum terlaksananya penanggulangan bencana secara sistematis pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sehingga masih menimbulkan banyak korban dan kerugian materi.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum dilakukan secara sistematis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Creswell (2016: 4) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu atau kelompok untuk meneliti masalah manusia dan sosial.” Menurut Arikunto (2010: 3) “Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk dapat menyelidiki suatu keadaan atau kondisi dan hal lain yang sudah di sebutkan, kemudian hasilnya di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam hal ini penelitian deskriptif memberikan gambaran secara cermat tentang keadaan dan gejala yang terjadi.”

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat di Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa mempunyai keadaan geologis, geografis, demografis, serta hidrologis yang mungkin saja dapat menimbulkan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan usaha sebagai upaya menanggulangi bencana secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi. Berikut Daftar Kejadian Bencana Di Kabupaten Gowa Tahun 2022 :

**Tabel 3.1**  
**Kejadian Bencana Di Kabupaten Gowa Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Area Terdampak	Jumlah Korban		
				Mengungsi	Luka	Meninggal
1	Parangloe	Longsor	27 Rumah	27	2	8
2	Pattalassang	Banjir	Perkampungan	5		
3	Pallanga	Banjir, angin kencang	10 Rumah	10		
4	Tinggimoncong	lonsor	35 Rumah	15		4
5	SombaOpu	Banjir	120 Rumah	20	4	
6	Manuju	Angin Kencang	3 Rumah	3		
7	Bajeng Barat	Angin Kencang	78 Rumah	10		
8	Barombong	Angin Kencang	32 Rumah	15		
<b>Jumlah Korban</b>				<b>105</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Berdasarkan data tersebut bencana terjadi di 8 kecamatan yang melanda beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Gowa pada tahun 2022 yaitu bencana longsor, banjir, dan angin kencang. Kejadian bencana di Kabupaten Gowa pada tahun 2022 berdampak pada pemukiman warga dengan sejumlah rumah. Dimana terdapat 12 orang meninggal, 6 luka, dan 105 mengungsi.

Berdasarkan peristiwa bencana yang terjadi pada tahun 2022 tersebut pemerintah daerah Kabupaten Gowa menetapkan status tanggap darurat sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2022 yaitu selama 20 (dua puluh) hari pada tanggal 24 Desember 2022 - 12 Januari 2023. Status tanggap darurat bencana di keluarkan oleh pemimpin daerah yaitu Bupati setelah memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat di lokasi bencana. Penentuan status tanggap darurat bencana sebagai sebuah dasar untuk memberi kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanganan tanggap darurat.

#### 3.2 Faktor Penyebab Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Belum Dilakukan Secara Sistematis Di Kabupaten Gowa

Pada bagian ini penulis akan melihat faktor penyebab penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum dilakukan secara sistematis di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan 5 dimensi penting, yaitu :

##### 3.2.1 Dialog Tatap Muka

Dalam perihal ini untuk menakar dialog tatap-muka kolaborasi penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Dikaji dengan 2 (dua) indikator yakni membangun komunikasi dan diskusi antar pihak sebagai berikut :

##### a. Membangun Komunikasi

Dalam rangka membangun komunikasi awal terkait kegiatan tanggap darurat adalah Pelaksanakan

Apel Gabungan Siaga Bencana bersama SKPD, Kegiatan ini dilaksanakan sekali setahun dan dilakukan pada akhir tahun. Apel gabungan dihadiri oleh seluruh instansi/ lembaga terkait dalam pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan pada Hari Kesiapsiagaan. Semua pihak yang terlibat menampilkan serta mengeluarkan kekuatan masing-masing dari personil hingga peralatan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Beberapa informan juga menyampaikan agar diupayakan juga apel rutin setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) untuk memantau kesiapsiagaan peralatan dan personil dimana kegiatan ini cukup dilakukan di kantor masing-masing.

Selanjutnya menurut keterangan beberapa informan kegiatan komunikasi eksternal yang melibatkan masyarakat yaitu sosialisasi dan simulasi baru diadakan pada tahun 2022 karena ada pandemic covid kegiatan ini tidak dilaksanakan selama beberapa tahun. Saat ini sosialisasi dan simulasi belum dilakukan lagi secara rutin untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi maka BPBD Kabupaten Gowa sering menghadiri kegiatan sebagai narasumber di acara desa/kelurahan, kampus-kampus, PMI, Pramuka dan kelompok masyarakat. Program lainnya adalah Desa Tangguh Bencana yang telah terlaksana di 2 (dua) desa rawan bencana. Selain itu belum ada Forum resmi untuk melaksanakan diskusi antara seluruh unsur terkait (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media) untuk menyusun aturan dan mekanisme mekanisme penanggulangan bencana yang baku. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) saat ini hanya dilakukan melalui Forum di kegiatan kegiatan Destana (Desa Tangguh Bencana) yang dilakukan pada komunitas masyarakat tertentu.

Kegiatan membangun komunikasi sebagai awal membentuk kesamaan pemahaman dan tujuan dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat sudah dilakukan dengan komunikasi internal yang melibatkan sesama Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dengan melaksanakan apel gabungan siaga bencana dan komunikasi eksternal melibatkan masyarakat dengan sosialisasi dan simulasi tanggap darurat penanggulangan bencana, program Desa Tangguh Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Hal ini sebagai faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat dengan sistematis karena masih jarang nya kegiatan yang mendukung jalannya komunikasi langsung antara unsur pemerintah, relawan dan masyarakat dalam mewujudkan pemahaman mengenai kesiapsiagaan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk pengurangan resiko menghadapi ancaman bencana dan saat kejadian bencana masih belum di pahami oleh semua pihak khususnya masyarakat sebagai upaya untuk dapat mengurangi dampak yang lebih besar saat terjadi bencana.

#### **b. Diskusi Antar Pihak**

Untuk beberapa kondisi penting, diskusi antar pihak sudah dilakukan di BPBD Kabupaten Gowa, seperti saat penetapan status tanggap darurat, aktivasi Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan saat aktivasi rencana operasi tanggap darurat. Hanya saja pada rapat yang dilakukan untuk aktivasi rencana operasi tanggap darurat sering menemui kendala. Hal ini di sebabkan karena rencana kontigensi yang akan di aktivasi menjadi rencana operasi saat ada kejadian bencana di Kabupaten Gowa sudah habis masa berlakunya. Rapat rapat yang seharusnya dilakukan untuk penyusunan rencana kontigensi dan dilakukan saat kondisi pra bencana belum pernah dilakukan lagi sehingga dapat memperlambat penentuan rencana operasi tanggap darurat yang baru dilakukan pada saat terjadi bencana.

### **3.2.2. Membangun Kepercayaan**

Dalam dimensi ini penulis menggunakan 3 (tiga) indikator untuk menganalisis permasalahan yang diangkat terkait tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat belum terlaksana secara sistematis di Kabupaten Gowa. Adapun 3 (tiga) indikator tersebut adalah keterbukaan informasi, kompetensi dan kesiapan personil, sarana prasarana kegiatan lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Keterbukaan Informasi**

Kabupaten Gowa telah memiliki media informasi yang mendukung jalannya keterbukaan informasi

dalam rangka penanggulangan bencana yang dapat di jadikan acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat setempat dalam memperoleh informasi yang akurat sebelum dan saat terjadi bencana. Namun terdapat media informasi yang belum seluruhnya tersedia yaitu *Early Warning System* (EWS) Bencana longsor, banjir, tsunami, dan gempa.

Kabupaten Gowa memiliki informasi yang cukup tentang ancaman bahaya dalam bentuk peta rawan bencana yang digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dan juga untuk alokasi anggaran rencana kontigensi penanggulangan bencana. Selain itu untuk informasi akurat dan terkini penanganan darurat bencana di Kabupaten Gowa menyangkut tentang kondisi bencana, jumlah korban, kerugian harta dan lainnya di kelola oleh media centre yang ada pada pos komando penanggulangan bencana tanggap darurat. Penyebaran informasi umum belum sepenuhnya maksimal untuk beberapa masyarakat di beberapa daerah dataran tinggi sehingga menjadi faktor penyebab belum terlaksananya pelaksanaan tanggap darurat secara sistematis karena informasi yang diperoleh masih terbatas oleh akses jaringan seluler yang sulit di sebagian daerah Kabupaten Gowa. Selain itu belum adanya *Early Warning System* (EWS) di daerah rawan bencana sehingga lambat memperoleh informasi peringatan dini.

**b. Kompetensi dan Kesiapsiagaan Petugas**

Dengan tersedianya petugas yang kompeten baik secara individu maupun secara tim akan mempercepat dan membantu pelaksanaan tanggap darurat. Berikut daftar kualifikasi personil tanggap darurat bencana di Kabupaten Gowa Tahun 2022.

**Tabel 3.1**

**Kualifikasi Personil Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Gowa Tahun 2022**

No.	Kualifikasi	Jumlah Personil	Tempat Tugas
1	Lulusan SMA	11 orang	BPBD Gowa
3	Lulusan S1	4 orang	BPBD Gowa
4	Bersertifikat Pelatihan Dasar SAR	15 orang	BPBD Gowa
5	Bersertifikat Kompetensi	-	BPBD Gowa

Sumber : BPBD Kabupaten Gowa, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Gowa memiliki personil tanggap darurat bencana yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berjumlah 15 Orang. Dari 15 orang tersebut terdiri 11 orang lulusan SMA, 4 orang lulusan S1. Seluruh personil ini baru memiliki Sertifikasi Pelatihan Dasar SAR dan belum memiliki Sertifikat Kompetensi penggunaan peralatan penanggulangan bencana (PB). Dengan kekuatan tim yang hanya 15 orang maka kemampuan pelayanan TRC juga terbatas untuk melayani korban bencana di wilayah Kabupaten Gowa.

Kompetensi dan kesiapan personil menjadi salah satu faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat bencana secara sistematis karena personil Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Gowa sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana yang bertugas untukantisipasi kondisi tanggap darurat terbatas dengan jumlah personil yang hanya 15 orang. Personil TRC tersebut baru memiliki Sertifikat Pelatihan Dasar SAR, dan belum satu pun yang mempunyai Sertifikat Kompetensi penggunaan peralatan penanggulangan bencana (peralatan PB). Untuk itu perlu penguatan personil TRC dengan menambah jumlah personil dan perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penanggulangan bencana (PB) untuk memaksimalkan pelaksanaan tanggap darurat di seluruh area Kabupaten Gowa yang mempunyai banyak daerah rawan bencana.

### c. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Pelaksanaan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa memiliki beberapa sarana prasarna. Rata-rata kondisi sarana dalam keadaan baik tapi ada beberapa yang rusak. Selain BPBD Kabupaten Gowa yang bertanggung jawab dalam penyedia sarana dan prasana perlengkapan yang di butuhkan saat tanggap darurat, ada juga lembaga lain yang di tetapkan sebagai pelaksana penyedia sarana prasarana tanggap darurat. Berikut daftar pelaksana penyediaan sarana prasarana tanggap darurat :

**Tabel 3.2**  
**Penyediaan Sarana Prasarana Tanggap Darurat**

No	KEGIATAN	PELAKSANA
1	Menyiapkan Sarana Transportasi dan Evakuasi	Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, TNI, Polri dan Dinas Kesehatan
2	Menyiapkan lokasi/tenda pengungsian dan sarana penerangan	Dinas Sosial, Satpol PP, PLN, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertambangan
3	Menyiapkan Sarana MCK	Dinas PU, BPBD, PDAM
4	Menyiapkan Sarana Kebersihan di pengungsian	Dinas PU
5	Menyiapkan Sarana Air Bersih di pengungsian	Dinas PU, PDAM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
6	Penyediaan tempat Pos Kesehatan, Dapur Umum & Gudang Logistik Lapangan	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PMI, BPBD
7	Menyiapkan Alat Pemulihan fungsi sarana prasarana umum	Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan

Sumber: BPBD Kabupaten Gowa

Berdasarkan data tersebut sudah di tentukan pelaksana penyedia sarana prasarana yang di butuhkan dalam situasi tanggap darurat bencana sehingga pihak-pihak yang telah di tetapkan sebagai pelaksana penyedia sarana prasarana dapat memahami tugas dan mengetahui tanggung jawabnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat.

Salah satu faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis di sebabkan oleh sarana prasana pendukung pelaksanaan tanggap darurat. Peralatan dan perlengkapan yang di miliki BPBD Kabupaten Gowa masih terbatas dengan kondisi sebagian rusak dan perlu perbaikan. Walaupun dalam pelaksanaan operasional kekurangan peralatan dan perlengkapan masih bisa dibantu dari unit lainnya, tapi sebaiknya peralatan peralatan utama yang menjadi tanggung jawab BPBD dapat disediakan sendiri. Untuk itu BPBD Gowa perlu menambah jumlah dan kapasitas peralatan dan melakukan perbaikan peralatan yang rusak serta melakukan pendataan ulang peralatan yang dimiliki instansi lain, baik pemerintah maupun swasta agar lebih mudah saat mobilisasi.

### 3.2.3 Komitmen Terhadap Proses

Dengan adanya komitmen dalam sebuah proses tanggap darurat akan menciptakan sebuah pengakuan bersama untuk mematuhi hasil kesepakatan masing masing pihak saling memahami kewajiban dan tanggung jawab. Dalam hal ini akan dikaji dalam 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan komitmen terhadap proses yaitu saling memahami ketergantungan dan mempunyai rasa tanggung jawab sebagai berikut :

#### **a. Saling Memahami Ketergantungan**

Sinergi dalam rangka kolaborasi lintas sektor/bidang yang terlibat dalam kegiatan operasional tanggap darurat sudah baik dengan memahami ketergantungan satu dengan yang lain dari pembagian per sektor/bidang dalam struktur komando, Masing masing sektor ini terdiri dari beberapa instansi/lembaga pemerintahan lainnya. Tugas Komandan Posko yang dibantu koordinator masing masing sektor untuk selalu mengkoordinir dan mengingatkan personilnya pada saat rapat koordinasi maupun saat breafing pagi bahwa tanggap darurat bencana tidak bisa dikerjakan secara sendiri sendiri, tetapi harus berkolaborasi dan bersinergi lintas sektoral dan lintas bagian sebagai wujud dari team work.

Saling memahami ketergantungan bukan faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis. Hal ini disebabkan karena adanya kolaborasi dan sinergi diantara sektor/bidang terkait dibawah satu komando berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Tugas komandan posko dibantu koordinator sektor/bidang membuat semua pihak saling berkolaborasi dan bersinergi sesuai sektor dan bidangnya masing masing sudah berjalan baik. Walaupun disadari bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan tapi secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan tanggap darurat.

#### **b. Mempunyai Rasa Tanggung Jawab**

Dalam penerapan tugas dan fungsi struktur organisasi pos komando tanggap darurat bencana disesuaikan dengan Sektor/Bidang masing masing yang telah di kelompokkan dalam Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Indikator mempunyai rasa tanggung jawab bukan faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis. Hal ini dikarenakan masing masing sektor/bidang yang terlibat dalam struktur pos komando penanggulangan tanggap darurat di Kabupaten Gowa memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai keahlian bidang masing masing dalam satu garis komando. Komandan posko yang dibantu koordinator masing masing sektoral selalu memberikan arahan yang diberikan setiap breafing atau rapat koordinasi yang dilakukan rutin maupun terjadwal untuk meningkatkan rasa tanggung jawab setiap individu dan kelompok dalam pelaksanaan tanggap darurat.

### **3.2.4 Pemahaman Bersama**

Pada bagian ini peneliti mengkaji 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan pemahaman bersama yaitu kesamaan tujuan dan definisi masalah bersama.

#### **a. Kesamaan Tujuan**

Kesamaan tujuan penting dalam mewujudkan pemahaman bersama dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat menentukan arah strategis dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana. Terwujudnya kesamaan tujuan dapat berasal dari niat awal para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau aktivitas. kesamaan tujuan yang diaplikasikan dengan penerapan visi dan misi BPBD Kabupaten Gowa dalam melakukan pelaksanaan tanggap darurat sudah diterapkan dalam kegiatan kegiatan lintas sektoral. Hanya saja pemahaman visi dan misi ini masih lebih dominan diketahui oleh internal dari SKPD beserta jajarannya, TNI/Polri, dan unsur pendukung dalam kegiatan ini seperti relawan, kelompok masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang Visi dan Misi BPBD Gowa mengenai pelaksanaan tanggap darurat. Kondisi ini tidak mempengaruhi operasional secara keseluruhan dalam pelaksanaan tanggap darurat secara sistematis karena pada dasarnya adalah masing masing personil dari SKPD maupun para relawan mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan korban bencana sehingga lebih mengutamakan berkontribusi dan berkolaborasi maksimal dalam misi kemanusiaan.

#### **b. Masalah Bersama**

Masalah-masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan tanggap darurat bersifat terbuka dan tidak di

tutup-tutupi. Evaluasi kerja harian melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan setiap hari dalam rangka membahas kinerja harian dan kendala yang dihadapi setiap sektor untuk kemudian dicari solusi dan disepakati oleh semua sektor sehingga mencegah kendala tersebut tidak menjadi hambatan pelaksanaan tanggap darurat keesokan harinya.. masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana yang berdampak pada pelaksanaan tanggap darurat menyebabkan pekerjaan bisa terlambat atau terhenti sejenak. Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut seluruh tim dalam pelaksanaan tanggap darurat dilibatkan dalam evaluasi kerja harian yang dengan seksama membahas mengenai permasalahan atau kendala dilapangan yang terjadi agar hal tersebut tidak menjadi hambatan dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut indikator ini tidak menjadi faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis karena permasalahan yang dihadapi bersifat terbuka dan tidak ditutupi sehingga setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat mengetahui permasalahan bersama untuk segera diatasi dengan mencari solusi jangka pendek yang disepakati bersama. Hal ini dapat mewujudkan pemahaman bersama antara berbagai pihak yang terlibat mengenai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggap darurat sehingga dapat menjadi acuan agar pelaksanaan tanggap darurat tetap berjalan secara sistematis.

### **3.2.4 Dampak Sementara**

Dalam dimensi untuk menakar dampak sementara pelaksanaan tanggap darurat di Kabupaten Gowa maka dikaji dengan 1 (satu) indikator, yaitu :

#### **a. Perbaikan Proses**

Ada beberapa aksi yang dapat menjadi acuan perbaikan proses yang terjadi dalam pelaksanaan tanggap darurat oleh BPBD Kabupaten Gowa. Perbaikan dan penyempurnaan memang tidak serta merta kelihatan hasilnya, tapi memerlukan waktu dan proses serta menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan teknologi. Terdapat beberapa perbaikan proses dari sebelum terjadi bencana hingga saat terjadi bencana yang dapat mendukung pelaksanaan tata kelola tanggap darurat bencana di Kabupaten Gowa Perbaikan proses ini sudah langsung diterapkan namun beberapa masih merlukan program lanjutan.

Dalam hal ini faktor penyebab belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis tidak disebabkan oleh indikator perbaikan proses. Hal ini dikarenakan dalam tata kelola tanggap darurat bencana di Kabupaten Gowa saat ini sudah ada perbaikan proses Dalam hal ini perbaikan proses dirasakan oleh masyarakat menjadi sebuah kemenangan kecil bagi pihak-pihak yang berkolaborasi dalam pelaksanaan tanggap darurat untuk kedepannya menjadi acuan agar tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa dapat berjalan secara sistematis dengan mekanisme kerja yang baku sehingga dapat mengurangi berbagai kendala saat berlangsungnya tanggap darurat bencana.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pertama, belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis di Kabupaten Gowa disebabkan minimnya kegiatan pada dimensi dialog tatap muka antara berbagai pihak dari instansi atau lembaga pemerintahan, relawan, dan masyarakat. Membangun komunikasi yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, kerjasama antara desa/kelurahan, forum pengurangan risiko bencana dan apel siaga masih kurang dilakukan.

Kedua, belum terlaksananya tanggap darurat secara sistematis di Kabupaten Gowa karena belum sepenuhnya dapat membangun kepercayaan pada saat kondisi tanggap darurat. Hal ini disebabkan keterbatasan media informasi untuk peringatan dini (*Early Warning Sistem*) terutama untuk bencana banjir, longsor dan angin puting beliung yang sering terjadi di Kabupaten Gowa dan juga akses penyampaian informasi yang sulit ke masyarakat di dataran tinggi. Selain itu kapasitas personil, sarana

dan prasarana juga masih terbatas jumlahnya yang dapat memperlambat pelaksanaan tanggap darurat sehingga perlu dilakukan penguatan dengan menambah personil, meningkatkan kompetensi individu maupun secara team, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Ketiga, dimensi komitmen terhadap proses bukan faktor penyebab belum berjalannya tanggap darurat secara sistematis karena semua aktivitas yang berjalan selama tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Bupati, baik itu SK tentang Penetapan Status Tanggap Darurat maupun SK tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dimana sudah jelas pembagian tugas antar sektor/bidang sehingga dalam proses pelaksanaannya semua sektor/bidang saling mendukung dan saling tergantung satu sama lain dengan mengemban tanggung jawab masing masing dalam satu komando yang sama dari Pos Komando.

Keempat, dimensi pemahaman bersama bukan faktor penyebab belum berjalannya tanggap darurat secara sistematis karena dalam konteks pelaksanaan aksi operasi tanggap darurat sudah cukup baik walaupun dalam beberapa hal perlu dilakukan penguatan. Kesamaan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dikemas dalam Visi dan Misi.

Kelima, indikator dampak sementara bukan faktor penyebab belum berjalannya tanggap darurat secara sistematis karena sebagai salah satu indikator untuk menilai bahwa terdapat perbaikan proses dalam pelaksanaan tanggap darurat. Hal ini dapat dilihat bahwa secara umum proses kolaborasi dalam tatakelola bencana tanggap darurat sudah lebih baik dari sebelumnya, hanya saja tetap ada beberapa hal yang harus disempurnakan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan bahwa walaupun berbagai tim yang terlibat dalam tanggap darurat memiliki latar belakang berbeda-beda, tapi sejauh ini Visi dan Misi pada dasarnya mempunyai kesamaan tujuan yaitu lebih mengutamakan berkontribusi dan berkolaborasi maksimal dalam misi kemanusiaan. Selain itu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tanggap darurat selalu dibahas setiap hari dengan melibatkan seluruh unsur terkait yang memutuskan bersama solusi jangka pendek permasalahan sudah berjalan baik sehingga hal ini dapat mendukung terwujudnya pemahaman mengenai masalah bersama dalam pelaksanaan tanggap darurat.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tata Kelola Penanggulangan Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa belum dilakukan secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) proses kolaborasi yang dinilai masih kurang baik dalam mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana, yaitu :

1. Dialog tatap muka oleh seluruh pemangku kepentingan yang masih kurang sehingga berpengaruh terhadap hubungan komunikasi antar pihak untuk membangun pemahaman yang sama dan mempersiapkan segala bentuk perencanaan serta strategi yang baik dalam pelaksanaan tanggap darurat.
2. Membangun kepercayaan oleh seluruh pemangku kepentingan yang masih kurang sehingga berpengaruh terhadap keterbatasan informasi pada saat terjadi bencana, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan tanggap darurat, sarana prasarana yang kurang memadai sehingga memperlambat rangkaian kegiatan tanggap darurat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian,

oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan tata kelola penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

### C. Jurnal

Adinata, I. (2014-2016). *Analisis Tata Kelola Desa Tangguh Bencana Dalam Perspektif Pengurangan Risiko Bencana*. Malang: Doctoral dissertation Universitas Brawijaya.

Aisyah, N., & Amin, M. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Nagasari Situjuh Batua)*". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5.*, Jambi: Universitas Jambi

Sahilala, I. (2015). *Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro)* . Malang: Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya

Setiawan, R., Bunyamin, & Bunyamin, H. (2017). Perancangan Sistem Pengelolaan Penanggulangan Bencana Garut Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut*.